

Upaya Fasilitasi Pajak Online Kelompok UMKM di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Lia Ekowati✉, Rodiana Listiawati, Dini Ayuning Ratri S, Hastuti Redyanita, Atyanto
Mahatmyo

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia
Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16425
✉e-mail: lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

Diterima: 19 November 2023 | Direvisi: 6 Juli 2024 | Diterbitkan: 17 Agustus 2024

Abstract

The existence of the Cibinong district' micro, small and medium enterprise forum that can gather MSME owners in the region is very meaningful. Business actors have a very basic problem regarding Tax-Payer ID number ownership. However, knowledge about digital taxation is still very limited. Tax-Payer ID ownership is one of the requirements for entrepreneurs, both individuals and business entities, who want to apply for loans to banking and non-banking business institutions. The Ministry of Finance urges all levels of society to register as taxpayers and benefit from these efforts. This appeal is intended for people who have fulfilled the requirements in accordance with the provisions of tax legislation based on the self-assessment system in order to avoid tax sanctions. Community service of the PNJ DIII Finance and Banking Study Program in 2023 aims to help partners utilize their gadgets in making online Tax-Payer ID. The community service team provided assistance in training and mentoring of online Tax-Payer ID making at the Bappedalitbang Building Bogor Regency on July 11, 2023 with 30 training participants. The subjects to be shared were online taxation ID, explanation of the importance of Tax-Payer ID, registration of online Tax-Payer ID making. The participants of the program can finally own Tax-Payer ID to boost their business.

Keywords: Tax-payer ID, self-submission, UMKM,

Abstrak

Keberadaan forum UMKM Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang dapat menghimpun para pelaku UMKM di wilayah tersebut sangatlah berarti. Para pelaku usaha mempunyai masalah yang sangat mendasar mengenai kepemilikan NPWP dan pengetahuan tentang NPWP juga masih sangat minim bagi para UMKM di wilayah tersebut. Kepemilikan NPWP merupakan dasar bagi suatu usaha yang ingin naik kelas dalam usahanya. Kepemilikan NPWP menjadi salah satu syarat bagi para pengusaha baik perorangan maupun berbentuk badan usaha yang ingin mengajukan pinjaman ke lembaga usaha perbankan maupun non perbankan. Kementerian Keuangan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan mendapat manfaat dari upaya tersebut. Imbauan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* supaya dapat menghindari sanksi pajak. Oleh karena itu Tim pengabdian masyarakat mengadakan pendampingan dalam pembuatan NPWP secara *online*. Pengabdian masyarakat yang merupakan kegiatan rutinitas Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan PNJ bertujuan untuk membantu mitra memanfaatkan gadget yang dimiliki dalam pembuatan NPWP secara *online*. Untuk pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan di Gedung Bappedalitbang Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juli 2023 dengan peserta pelatihan sejumlah 30 mitra. Pelaksanaan pelatihan meliputi penjelasan pentingnya NPWP dan pendampingan langsung membuat NPWP secara *online*, dengan didampingi dan dipandu oleh panitia. Diharapkan dari kegiatan pelatihan ini para pelaku UMKM di Kecamatan Bogor dapat memiliki langsung NPWP untuk usahanya dan NPWP ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : NPWP, pendaftaran online, UMKM

Pendahuluan

Pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum yang kita kenal sebagai Pajak, ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Yustinus Prastowo dalam bukunya *Manfaat dan Resikonya memiliki NPWP* (2009) [1]. NPWP, atau Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah nomor identifikasi unik yang dikeluarkan untuk individu dan bisnis di Indonesia untuk tujuan perpajakan. NPWP memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan pajak dan mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia

Menurut Aditya Dama dan David Paul (2019), pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system* pada awal tahun 1984 [2]. Di dalam *self-assessment system* wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek pajak dan bukan lagi sebagai objek pajak. Untuk dapat mewujudkan *self-assessment system* dituntutlah kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Akan tetapi, di dalam kenyataannya tidak semua potensi pajak yang ada dapat dikelola sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Pada kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak.

Tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa

mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain menjadi lemah.

Pertanyaan yang sering ditanyakan “Mengapa kita harus memiliki NPWP”, NPWP yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik perorangan maupun badan usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu usaha produktif yang berperan penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi menurut Kementerian Koordinator Perekonomian RI (2021) [3].

Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada saat ini di Kabupaten Cibinong telah terdapat sebanyak kurang lebih 710.000 UMKM yang tersebar 400 desa dan 19 kelurahan yang bergerak dari bidang *fashion, craft* makanan, serta minuman. Untuk menjalin komunikasi dan berbagi informasi antar pelaku UMKM di Kabupaten Cibinong, maka dibentuklah Forum UMKM Kecamatan Cibinong yang memiliki sekretariat di Graha KADIN Kab. Cibinong Jalan. Tegar beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Dalam keberadaannya forum ini selain menjalini komunikasi antar anggota UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas UMKM yang ada di lingkungan Kecamatan Cibinong sekaligus menjadi tempat konsultasi para UMKM atas permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM Kecamatan Cibinong.

Menurut K. Jinarsari Sri Sampoerna dalam Pentingnya NPWP bagi wajib pajak [2019] [4] Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu : a). *Self Assessment System* yang Merupakan sistem

pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. b). *Official Assessment System* yang Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. c). *Withholding System* yaitu Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Sedangkan menurut Tjok Gde Agung Anggadhika, I Ketut Jat (2019) [5] dalam Pengaruh Kepemilikan NPPWP, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran WP Terhadap penerimaan Pajak Badan di KPP Gianyar (2019), Memaksimalkan penerimaan pajak dengan system self-assessment, bersama dengan meningkatkan WP aktif, Pemeriksaan dan penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga berusaha agar WP lebih sadar bahwa kewajiban bayar pajak sangat vital demi terlaksananya pembangunan nasional.

Adapun untuk menghindari sanksi pajak menurut K. Jinarsari Sri Sampoerna dalam Pentingnya NPWP bagi wajib pajak [2019] [4] Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan mendapat manfaat dari upaya tersebut. Imbauan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* supaya dapat menghindari sanksi pajak.

Yohana Fransiska Aurelia Vivian dalam Pajakku (2023) [6], mengatakan Berdasarkan data penerimaan negara dalam lima tahun terakhir tersebut, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penerimaan negara terus diiringi dengan meningkatnya jumlah NPWP dan jumlah pemilik NIK. Oleh karena itu, diharapkan seluruh penduduk Indonesia maupun Wajib Pajak dapat terus berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui ketaatan membayar pajak, sehingga menciptakan Indonesia sejahtera. Berikut tabel mengenai

perbandingan penerimaan negara dengan jumlah NPWP dan jumlah pemilik NIK dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Negara, NPWP , NIK

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Negara	1.943,7 triliun	1.960,6 triliun	1.647,8 triliun	2.011,3 triliun	2.443,6 triliun
Jumlah Wajib Pajak (NPWP)	42,57 juta	45,93 juta	49,84 juta	66,35 juta	70,15 juta
Jumlah Penduduk (NIK)	264,16 juta	266,911 juta	270,20 juta	272, 68 juta	275,77 juta

Sumber: Kementerian Keuangan 2023.

Keberadaan para UMKM yang ada di Kecamatan Cibinong tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Masalah NPWP menjadi masalah yang prioritas untuk dipecahkan mengingat pentingnya NPWP bagi para UMKM. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Forum UMKM Kecamatan Cibinong, keterbatasan pengetahuan dan minimnya informasi khususnya para UMKM punya anggapan pengurusan NPWP yang rumit dan memakan waktu, sementara NPWP ini sangatlah penting dan harus dimiliki oleh para UMKM jika ingin maju. Dan akan menghambat perkembangan para UMKM ke arah yang lebih baik kedepannya.

Mengingat pentingnya NPWP, prioritas pemecahan masalah difokuskan pada pembuatan NPWP untuk yang pertama kali atau mengaktifkan kembali NPWP yang sudah dimiliki tetapi sudah non efektif/kedaluarsa akibat tidak dipergunakan. Untuk masalah yang urgent ini membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Selama proses mendapatkan NPWP memang rumit sehingga banyak yang pada akhirnya tidak memiliki NPWP untuk menjadi pengusaha yang formal. Di sisi lain diketahui bahwa NPWP memiliki sejumlah manfaat bagi para pelaku usaha dalam hal ini UMKM. Dengan memiliki NPWP diyakini usaha mikro ini akan naik kelas karena NPWP merupakan salah satu syarat untuk pengajuan kredit usaha ke lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank. Dengan memiliki NPWP para UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem BUMN ataupun perusahaan swasta yang lebih besar.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, kelompok dosen pada program studi D3 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mencoba berkontribusi dalam hal edukasi dan pendampingan dalam pembuatan NPWP kepada kelompok UMKM Kecamatan Cibinong.

Untuk mengatasi permasalahan yang hendak dipecahkan dalam UMKM ini yang antara lain Pelaku UMKM belum mengetahui tata cara pengurusan dan pembuatan NPWP secara online baik yang baru atau sudah mempunyai tetapi mati karena sudah lama tidak dipergunakan. Sedangkan tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah: Peserta mengetahui cara membuat NPWP secara Online serta mengetahui manfaat NPWP memiliki NPWP bagi pengusaha perseorangan maupun dalam bentuk badan Usaha.

Pemilihan Forum UMKM Kecamatan Cibinong sebagai mitra pengabdian dimotivasi dari pengabdian masyarakat tahun lalu yang diadakan dilokasi yang sama, banyak para UMKM yang belum memiliki NPWP dalam pengamatan kami dengan meninjau langsung dan wawancara serta diskusi dengan pengurus UMKM Kecamatan Cibinong. Pemahaman dan pengetahuan serta ketrampilan pelaku UMKM di Kecamatan Cibinong dalam bidang pajak harus dimiliki sebagai UMKM masih sangat kurang, oleh karena itu pengusul merencanakan perlunya mengadakan pendampingan dan pembuatan NPWP di lingkungan UMKM Kecamatan Cibinong dengan tema “Pelatihan Pembuatan NPWP Secara Online pada UMKM Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat”. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut solusi dari permasalahan mitra.

Program yang akan dilaksanakan oleh tim dosen program studi D3 Keuangan dan Perbankan untuk membantu UMKM Kabupaten Bogor yaitu dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program Pendampingan. Kegiatan awal dilakukan dengan tahap brainstorming dan sharing dengan para pelaku UMKM Kecamatan Cibinong sebagai mitra pelatihan mengenai hambatan dalam

pembuatan perijinan dan pembuatan NPWP bagi yang belum memiliki dan bagi yang memiliki NPWP sudah mati atau kedaluarsa. Setelah mendapatkan informasi atas permasalahan mitra dan apa yang sudah mitra lakukan selama ini, maka pengusul memberikan informasi dan pemahaman kepada para UMKM mengenai pembuatan NPWP yang dapat membantu UMKM dalam pengajuan modal dengan baik kepada Lembaga perbankan maupun non Bank. Mitra UMKM Kecamatan Cibinong juga diberikan pemahaman tentang manfaat NIB dan NPWP dalam mengembangkan usahanya.

Selama pembuatan NPWP para UMKM Kecamatan Cibinong perlu diberikan pendampingan sampai dengan NPWP siap dapat digunakan. Karena selama ini UMKM Kecamatan Cibinong dalam mengajukan kredit masih banyak ditolak oleh bank yang salah satu penyebabnya tidak memiliki NPWP yang merupakan persyaratan utama yang ditentukan oleh bank. Kegiatan pendampingan pembuatan NPWP ini diharapkan dapat bermanfaat untuk UMKM Kecamatan Cibinong yang antara lain Pelaku UMKM Kecamatan Cibinong dapat lebih memahami pentingnya NPWP dalam usaha.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi D3 Keuangan dan Perbankan (Prodi D3 BK) dengan tema pokok kepemilikan NPWP bermaksud untuk memberikan kesadaran kepada para pelaku usaha akan pentingnya kepemilikan NPWP. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai tatacara mendapatkan NPWP secara online menjadi tantangan bagi pada dosen Prodi D3 BK untuk mendampingi para pelaku usaha dalam proses membuat NPWP. Pendampingan dilakukan secara berkesinambungan sesuai rencana kegiatan yang telah dirancang.

Keberhasilan dari proses pendaftaran NPWP dibuktikan dengan diterimannya email resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melampirkan NPWP dalam bentuk digital. Pengabdian selalu mendampingi

para pelaku usaha hingga mereka sukses mendaftarkan diri dan memiliki NPWP digital tersebut. Sasaran atau capaian akhir ini yang membedakan atau menjadi keterbaruan dari pengabdian Prodi D3 BK dengan pengabdian lainnya.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *community development*. Sebelum pelaksanaan dimulai, tim pelaksana membuat flyer kepada para anggota UMKM yang merupakan calon peserta melalui forum UMKM yang berada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Lalu para UMKM mendaftar dengan menggunakan Google form dimana Link pendaftaran telah dicantumkan di dalam flyer tersebut. Dari google form yang telah dikirim oleh tim pelaksana, lalu tim pelaksana mensortir dan mengambil 30 peserta UMKM yang belum mempunyai NPWP.

Berdasarkan data yang masuk dan diambil 30 peserta, tim pelaksana dapat mengklasifikasi sebagai berikut, para peserta yang mengikuti pembuatan NPWP ini terdiri 53% berpendidikan SMP, dan 43% berpendidikan SMA hanya ada 1 orang atau 3% yng berpendidikan sarjana. Sejumlah peserta tersebut, 13% sudah berusaha 1 sampai 2 tahun, 30% telah berusaha selama 2 tahun sampai 4 tahun, 17% telah berusaha selama 4 sampai 6 tahun dan 40% sudah berusaha lebih dari 6 tahun. Dilihat dari jenis usaha yang dikelolanya sekitar 43% berusaha dalam bidang kuliner, sedangkan 17% berusaha dalam bidang jasa dan pertanian, sisanya berusaha dalam bidang, Fashion, pedagang kelontong dan produksi kreatif. Dilihat dari modal yang digunakan sekitar 47% bermodal Rp 100.000 – Rp 3000.000, dan 40% memiliki modal Rp 3000.001 – Rp 5.000.000, dan 10% memiliki modal Rp 5.000.001 – Rp10.000.000, sisanya 3% bermodal 10.000.001 – dibawah 1 Milyar. Untuk lebih jelasnya karakteristik para UMKM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Karakteristik UMKM Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah UMKM	Persentase
1	SMP	16	53%
2	SMA	13	43%
3	Sarjana	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 3. Karakteristik UMKM berdasarkan Lama usaha (Tahun)

No	Lama Berusaha (Tahun)	Jumlah UMKM	Persentase
1	1 sampai dengan 2	4	13%
2	2,1 sampai dengan 4	9	30%
3	4,1 sampai dengan 6	5	17%
4	Diatas 6 tahun	12	40%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4. Karakteristik UMKM berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah UMKM	Persentase
1	dagang	2	7%
2	Fashion	2	7%
3	Jasa	5	17%
4	Kuliner (Makanan/Minuman)	13	43%
5	Pertanian	5	17%
6	Produk Kreatif	3	10%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 5. Karakteristik UMKM berdasarkan Modal Usaha

No	Modal Usaha	Jumlah UMKM	Persentase
1	Dibawah Rp 100.000 - Rp 3.000.000	14	47%
2	Rp 3.000.001 - Rp 5.000.000	12	40%
3	Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	3	10%
4	Diatas Rp 10.000.001 - Dibawah 1 Milyar	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 6. Karakteristik UMKM berdasarkan Omzet Perbulan

No	Omzet Perbulan	Jumlah UMKM	Persentase
1	Rp 0 - Rp 1.000.000	13	43%
2	Rp 1.000.001 - Rp 10.000.000	9	30%
3	Rp 10.000.001 - Rp 50.000.000	7	23%
4	Rp 50.000.001 - Rp 70.000.000	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan NPWP ini dilakukan secara luring (*offline*) pada tanggal 11 Juli 2023. Pelatihan diberikan kepada para pelaku UMKM Kecamatan Cibinong yang berjumlah sebanyak 30 orang.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pelatihan pembuatan NPWP ini dilakukan di Gedung Bappedalitbang Kabupaten Bogor Komplek Perkantoran Pemda Cibinong Jalan Segar 3. Kabupaten Bogor. pada tanggal 11 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB, dengan peserta pelatihan yang berasal dari para pelaku UMKM sebanyak 30 orang. Penyaji materi berasal dari Tim dosen PNJ. Materi yang diberikan

mengenai Pemaparan tentang penting nya NPWP serta pembuatan NPWP dengan melakukan pendampingan dengan harapan peserta dapat membawa hasil NPWP nya Secara langsung.

Dari 30 peserta UMKM, 80% nya adalah usaha mikro atau pelaku usaha rumahan dimana jumlah pegawai, dan omzet penjualannya masih minim. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembuatan NPWP ini diawali dengan sambutan dari Sekretaris Jurusan Akuntansi yang mewakili pihak jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor sebagai perwakilan dari mitra. Terakhir sambutan dari Ketua Pelaksana pelatihan. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.

Untuk kegiatan pembuatan NPWP diawali dengan *brainstorming* dan diskusi (dipimpin oleh narasumber) mengenai permasalahan dan kendala pembuatan NPWP yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai pentingnya memiliki NPWP, lalu mempraktekkan pembuatan NPWP secara Online yang dipandu oleh Ibu Lia Ekowati sebagai Narasumber dibantu oleh beberapa rekan dosen yang mendampingi para UMKM. Peserta pelatihan juga langsung praktik membuat NPWP menggunakan *gadgetnya* masing-masing dengan didampingi dan dibimbing oleh narasumber dan tim. Mitra pelatihan dibekali dengan keterampilan untuk dapat membuat NPWP secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: ereg.pajak.co.id dengan menggunakan gadget masing-masing.

Para peserta pelatihan dalam mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP harus melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, mengakses website resmi DJP untuk pendaftaran NPWP secara online, yaitu: www.ereg.pajak.co.id. *Kedua*,

membuat akun pajak dengan mempersiapkan email aktif dan nomor kontak aktif. *Ketiga*, melakukan verifikasi akun pajak yang notifikasinya dikirim ke email aktif dan nomor kontak aktif. *Keempat*, mengisi data diri yang diminta. *Kelima*, melengkapi lembar pernyataan yang diminta. *Keenam*, mengajukan permohonan NPWP. *Ketujuh*, permohonan disetujui, maka terbit NPWP.

Dalam kegiatan pelatihan pembuatan NPWP terdapat beberapa peserta yang sebelumnya telah memiliki NPWP. Namun karena sudah keluar atau tidak bekerja lagi maka NPWP tersebut tidak aktif. Untuk kondisi ini, tim membantu peserta tersebut untuk mengajukan permohonan pengaktifan kembali NPWP. Permohonan ini menggunakan formulir yang telah disiapkan oleh DJP dan diisi sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Permohonan yang telah lengkap dikirim ke DJP untuk diproses dan peserta diminta untuk selalu memantau email atau nomor kontaknya untuk mengetahui perkembangan permohonannya

Dari pelatihan dan pmdampingan yang dilaksanakan, terdapat beberapa pelaku usaha UMKM yang berhasil membuat NPWP. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan adanya email dari DJP dan terlampir NPWP digital. Namun di sisi lain, sebagian besar pelaku usaha belum berhasil membuat NPWP. Dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh peserta UMKM. Adapun kendala dan solusi yang terjadi dalam pembuatan NPWP tersajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Kendala dan Solusi Pembuatan NPWP

No	Kendala	Solusi
1	Peserta tidak memiliki email	Dibuatkan email oleh tim panitia
2	Peserta tidak tahu cara membuat email	Dibuatkan email oleh tim panitia
3	Data NIK tidak valid, artinya tidak sesuai dengan data Dukcapil	Dihimbau untuk lapor ke Dukcapil
4	NIK telah digunakan oleh anggota keluarga yang lain	Dihimbau untuk lapor ke Dukcapil
5	Suami isteri bercerai, NIK isteri masih digunakan oleh mantan suaminya	Dihimbau untuk lapor ke Dukcapil
6	Server perpajakan untuk mendaftar NPWP secara online, yaitu: www.ereg.pajak.go.id , sering down atau tidak bisa diakses	Menunggu hingga server dapat diakses kembali dan tetap didampingi.
7	Hanya operator seluler tertentu yang dapat daftar akun wajib pajak, yaitu: Telkomsel dan Indosat	Dihimbau agar membuat nomor kontak baru.
8	Peserta tidak memiliki pulsa untuk menerima SMS aktivasi akun	Tim panitia melakukan pengisian pulsa ke peserta.
9	Telepon seluler (HP) yang digunakan tidak mensupport	Pendaftaran melalui laptop atau PC atau menggunakan HP panitia



Gambar 1. Proses pembuatan NPWP



Gambar 2 Pemberian Materi NPWP



Gambar 3 Foto Bersama Peserta Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pelatihan juga diisi dengan melakukan tanya jawab dan sharing tentang kendala yang dihadapi dan diberikan solusinya. Hasil dari pemberian materi

pelatihan, beberapa pelaku UMKM berhasil membuat NPWP, namun masih banyak yang tidak berhasil membuat NPWP dikarenakan kendala yang dihadapi seperti yang telah disampaikan pada Tabel.8.



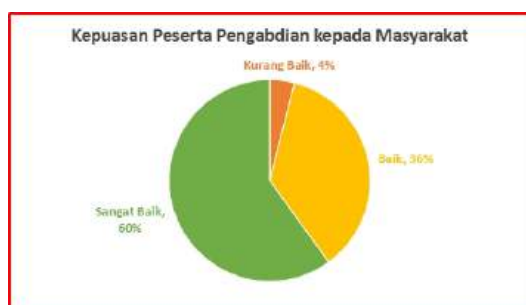
Gambar 4. NPWP yang telah siap digunakan

Kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Hal ini terlihat dengan antusiasnya para peserta pelatihan yang terus menyimak materi yang diberikan oleh narasumber dengan serius dan aktif bertanya. Mitra pelatihan dalam hal ini Forum UMKM Kabupaten Bogor dan Pengurus UMKM Kecamatan Cibinong meminta untuk diadakan lagi pelatihan berkelanjutan berupa pelatihan pembukuan, pelatihan pembuatan *business plan* atau pelatihan motivasi. Diakhir kegiatan mitra pelatihan diberikan paket kontener berisi sembako. Selain itu juga diberikan peralatan usaha dan perlengkapan berupa Rak susun Aluminium untuk Forum UMKM Kabupaten Bogor.

Kepuasan Peserta Pengabdian kepada Masyarakat

Sistem yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan peserta pengabdian menggunakan sistem survey yang dilakukan kepada peserta pengabdian. Sampel yang digunakan adalah sampel total yaitu diambil dari seluruh peserta pengabdian sejumlah 30 pelaku usaha. Dalam survey ini, instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang diisi oleh seluruh peserta pengabdian. Analisis tingkat kepuasan dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan membuat tabel frekuensi.

Hasil yang didapat melalui survey terhadap pelaksanaan pengabdian tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: Sangat Baik (score 4), Baik (score 3), Kurang Baik (score 2) dan Tidak Baik (score 1). Dengan 8 indikator sebagai berikut (1) Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan PKM, (2) Hasil pengabdian dapat dimanfaatkan oleh peserta secara maksimal, (3) Hasil pengabdian sesuai dengan solusi yang diharapkan oleh peserta, (4) Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen Prodi D3 Keuangan dan Perbankan telah sesuai dengan kebutuhan peserta pengabdian, (5) Kemampuan program pengabdian dalam menyelesaikan masalah peserta, (6) Manfaat ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi peserta, (7) Motivasi peserta dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tersebut, (8) Pelaksanaan pengabdian dilakukan sesuai kaidah metode ilmiah.



Gambar 5 Kepuasan Peserta Pengabdian kepada Masyarakat.

Pada gambar 5 menginformasikan kepuasan peserta pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Terdapat 30 peserta pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pengabdian. Dari seluruh peserta pengabdian sebanyak 60% menyatakan kepuasan yang sangat baik, 36% menyatakan kepuasan yang baik dan 4% menyatakan kepuasan yang kurang baik. Secara keseluruhan para peserta selaku responden dalam survey ini berpendapat bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Prodi D3 Keuangan dan Perbankan sudah sangat baik dan bermanfaat. Kegiatan penelitian dan pengabdian perlu

dilanjutkan terus secara berkelanjutan. Selain itu, peserta juga mengharapkan agar program pengabdian selanjutnya diperpanjang waktunya serta ada keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan pendampingan pembuatan Legalitas NPWP bagi para UMKM yang berdomisili di Kabupaten Bogor, secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah dilaksanakan sesuai rencana. Materi yang diberikan oleh narasumber telah menambah wawasan dan keterampilan mitra pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan *gadget* yang dimilikinya dan mengoptimalkannya sebagai alat pembuatan NPWP secara online melalui website resmi DJP yang saat ini sedang trend dimasyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Jakarta yang telah membiayai kegiatan pengabdian masyarakat program studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi dalam bentuk kegiatan Upaya Kepemilikan Legalitas NIB dan NPWP Pada UMKM Kecamatan Cibinong Bogor Jawa Barat. Pelatihan dan pendampingan pembuatan NPWP dan NIB peserta UMKM Kecamatan Cibinong Dengan Menggunakan Aplikasi OSS. Terima kasih pula untuk pengurus Forum UMKM Kabupaten Bogor dan pengurus UMKM Kecamatan Cibinong sebagai mitra pelatihan atas izin penyediaan tempat untuk kegiatan pelatihan dan kerjasamanya sebagai narahubung dengan mitra para pelaku UMKM di Kecamatan Cibinong.

Daftar Pustaka

- [1] K. Jinarsari Sri Sampoerna (2019), Pentingnya NPWP bagi wajib pajak
- [2] Aditya Dama, David Paul dkk (2019), Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Manado, Jurnal INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL Volume 1, NUMBER 2, 2019

- [3] Kementerian Koordinator Perekonomian RI, “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia, ”*ekon.go.id*, 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- [4] K. Jinarsari Sri Sampoerna (2019) dalam Pentingnya NPWP bagi wajib pajak .
- [5] Tjok Gde Agung Anggadhika, I Ketut Jat (2019) [5] dalam Pengaruh Kepemilikan NPPWP, Pemerisaan, Penagihan, Kesadaran WP Terhadap penerimaan Pajak Badan di KPP Gianyar (2019),
- [6] YohanaFransiskaAureliaVivian, Artikel Pajakku <https://www.pajakku.com/read/63e5fbe3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir,->